

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus suap terkait perizinan tambang di Tanah Bumbu yang diterima oleh Mardani H Maming selaku bupati Tanah Bumbu pada saat itu kini sedang menjadi perhatian masyarakat. Mardani H Maming diketahui merupakan politisi dari PDI Perjuangan, selama ini ia dikenal sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mardani H Maming lahir di Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 17 September 1981. Ia mengawali karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu 2009. Mardani Maming menjabat sebagai anggota DPRD hanya selama setahun, hal itu karena pada 2010 ia terpilih sebagai Bupati Tanah Bumbu melalui Pilkada. Jabatan tersebut diembannya selama 2 periode, yakni 2010-2015 serta 2016-2018. Pada periode keduanya menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming tak menuntaskan masa jabatan karena mengundurkan diri pada awal Maret 2018.

Informasi mengenai tersangka Mardani Maming terkait kasus suap izin tambang masih terus diselidiki hingga kini, dengan demikian media massa memainkan peran penting dalam menginformasikan kepada publik dan mengawasi proses penyelidikan ini dengan memberikan informasi seputar perkembangan kasus kepada publik. Pada saat kondisi apapun pada umumnya media selalu berusaha untuk memberikan informasi secara konsisten terkait pemberitaan kasus suap izin tambang yang diterima oleh Mardani Maming. Menurut Sitohang (2018) Suap merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang telah lama menghinggapinya masyarakat. Setiap orang yang menawarkan suap biasanya melakukannya untuk memenuhi keinginannya sendiri dengan imbalan suatu bentuk keuntungan tertentu atau sebagai kompensasi atas bantuan orang lain, seperti hukuman atau penghakiman. Karena itu, orang yang paling mungkin di suap adalah pejabat pemerintah yang jeli melihat detail dalam menilai suatu situasi, seperti saat perizinan atau saat memutuskan proyek pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu sumber berita utama soal Mardani Maming terkait kasus suap izin tambang. Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta permohonan atas pencegahan bepergian keluar negeri atas nama Mardani H Maming pada tanggal 20 Juni 2022 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimana Achmad Nur Saleh selaku Kepala Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu itu berstatus tersangka saat dicegah. Saleh juga menjelaskan bahwa permohonan KPK itu sudah dikabulkan oleh pihak Imigrasi, sehingga Mardani Maming sudah mulai dicegah untuk keluar negeri berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Di sisi lain, kuasa hukum Mardani Maming telah menyatakan bahwa kliennya belum menerima surat pencegahan ke luar negeri tersebut dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan bahwa mereka masih menunggu Salinan resmi tersebut atau keputusan larangan bepergian (Dirgantara, 2022).

Tak lama berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menganalisis dokumen yang relevan. Sumber-sumber tersebut antara lain kantor ESDM Tanah Bumbu, kantor ESDM provinsi Kalimantan Selatan, dan PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN). Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan bahwa lebih dari dua bukti telah ditemukan setelah penyelidikan ekstensif dan pengumpulan data, informasi, dan dokumen yang relevan. Barang bukti tersebut antara lain, 129 surat atau dokumen, 18 orang yang memberikan informasi yang dapat ditemukan dalam log permintaan informasi termasuk permintaan informasi yang ditujukan kepada Mardani Maming dan alat bukti elektronik yang membuktikan suatu hal. Penyidik juga menemukan bukti bahwa Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming saat itu telah secara ilegal mengalihkan kewenangan operasional produksi batubara dari PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT PCN (Yuantisya, 2022).

Menurut Chusna (2022) Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan KPK, kekayaan Mardani Maming per 31 Maret 2018 dilaporkan mencapai Rp44,8 miliar ini adalah LHKPN terbaru yang diajukan Mardani dalam kapasitasnya sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Pengumuman kekayaan Mardani terbaru di situs e-LHKPN KPK menunjukkan peningkatan kekayaan yang signifikan dibandingkan saat pertama kali menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Selama bulan Juli 2011, Mardani mengumpulkan kekayaan sebesar Rp 17,6 miliar. Kemudian, pada April 2014, naik menjadi Rp 46,07 miliar. Kekayaan bersih Mardani meningkat menjadi Rp 67,1 miliar pada 28 Juli 2015. Namun, kekayaan Mardani Maming menurun menjadi Rp 26,4 miliar pada 2016.

Pemberitaan perihal kasus suap yang diterima oleh Mardani Maming sedang ramai dibicarakan oleh sejumlah media, Mardani H Maming diduga menerima uang sekitar Rp 104,3 miliar pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2020 terkait izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu. KPK menjelaskan bahwa mengusut kasus dugaan suap pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu atas laporan masyarakat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo. Jika dibandingkan dengan kasus yang serupa, menurut data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) terkait kasus korupsi sektor lingkungan seperti kasus suap izin tambang yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam pada tahun 2016, selama periode 2009-2014 Nur Alam diduga menerima suap senilai lebih dari Rp 60 Miliar.

Sebagian besar berita yang ada di media memberikan informasi tentang adanya dugaan kasus suap yang diterima oleh Mardani Maming terkait dengan izin pertambangan. Dengan adanya kasus tersebut sejumlah media turut memberitakan hal tersebut khususnya pada portal berita Kompas.com dan Prokal.co. Dalam penelitian ini akan menganalisis artikel yang ada pada portal media *Online* Kompas.com dan Prokal.co, pada portal media *Online* tersebut peneliti menggunakan 10 artikel dari Kompas.com dan 10 artikel dari Prokal.co. Karena dari artikel tersebut peneliti ingin melihat hasil dari pembeding yang dilakukan oleh kedua media tersebut dalam memberitakan pemberitaan kasus suap izin tambang Mardani Maming dalam pemberitaan di portal berita Kompas.com dan Prokal.co.

Tabel 1.1 Pemberitaan Kasus Mardani Maming Pada Media Nasional

<b>Media Nasional</b>	<b>Pemberitaan Kasus Suap Mardani Maming</b>
<b>Kompas.com</b>	71 Berita
<b>Detik.com</b>	69 Berita
<b>Tribunnews.com</b>	59 Berita
<b>Sindonews.com</b>	47 Berita
<b>Merdeka.com</b>	43 Berita
<b>Suara.com</b>	9 Berita

Peneliti juga memilih media nasional Kompas.com karena Kompas merupakan salah satu dari media besar yang ada di Indonesia saat ini, selain itu juga Kompas.com lebih banyak memberitakan terkait kasus suap izin tambang yang di terima Mardani Maming. Kompas.com juga memiliki ideologi independent, sehingga pada pemberitaan kasus suap izin tambang Mardani Maming ini Kompas.com membingkai bahwa pada kasus tersebut menampilkan penggunaan diksi yang netral dan banyak narasumber yang berasal dari pihak KPK serta pihak Mardani Maming. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com peduli terhadap pemberitaan atas kasus suap yang di terima oleh Mardani Maming. Sedangkan alasan peneliti memilih dari media Prokal.co itu sendiri karena Prokal.co merupakan media lokal dari Kalimantan, dengan adanya media lokal ini dapat memudahkan para wartawan daerah Kalimantan untuk mendapatkan informasi apa saja yang sedang terjadi di Kalimantan karena adanya aspek kedekatan (*proximity*), mengingat kasus suap ini terjadi di daerah Tanah Bumbu, Kalimantan selatan serta sebagai media lokal perlu memiliki perspektif yang unik tentang daerah, berbeda dengan media nasional yang membahas secara luas dan juga pada kasus ini narasumber yang ada pada pemberitaanya banyak dari KPK serta ada narasumber dari DPRD Tanah Bumbu.

Media massa dapat membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat terlebih bagaimana sebuah media dalam melakukan pembingkai berita yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih media nasional Kompas.com dan media lokal Prokal.co, hal ini

dikarenakan kedua media tersebut turut memberitakan kasus suap izin tambang yang di terima oleh Mardani H Maming serta perbedaan ideologi yang dimiliki oleh kedua media tersebut, dan juga Kompas.com lebih memperlihatkan kata-kata yang netral dalam pemberitaan, sedangkan Prokal.co memperlihatkan kata yang mengkritik Mardani H Maming serta menggunakan narasumber dari politikus, hal ini mencerminkan ideologi yang digunakan Prokal.co untuk mengungkapkan realitas sesuai dengan peristiwa di lapangan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kedua media ini akan menghasilkan output yang berbeda terkait pemberitaan kasus suap izin tambang Mardani Maming yang dibingkai oleh media tersebut.

Tabel 1.2 Artikel Berita Kompas.com dan Prokal.co

No.	Artikel Kompas.com	Artikel Prokal.co
1	Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati	Anggota DPRD Tanbu ini Sebut Kekayaan Mardani Melonjak saat Jadi Bupati



Gambar 1.1 Artikel berita Kompas.com dan Prokal.co

Media nasional Kompas.com dan media lokal Prokal.co memiliki bentuk pemberitaan yang berbeda, dilihat dari judul “Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati” ini merupakan judul yang dituliskan oleh Kompas.com, sedangkan artikel dengan judul “Anggota DPRD Tanbu ini Sebut Kekayaan Mardani Melonjak saat Jadi Bupati”. Judul yang diberikan oleh Kompas.com terlihat lebih netral dengan menggunakan kata “Naik

Signifikan” dan Kompas.com juga dalam pemberitaan ini tidak menampilkan foto apapun. Dalam Kompas.com isi pemberitaannya tentang harta kekayaan yang terakhir dilaporkan oleh Mardani Maming yang bertambah signifikan dibandingkan ketika dia awal menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu menurut situs Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Sedangkan media lokal Prokal.co menuliskan judul yang cukup berani dengan sebutan kata “Melonjak” serta dengan detail menampilkan foto dari Fawahisah Mahabatan selaku anggota DPRD Tanah Bumbu. Pada Prokal.co isi pemberitaannya dengan narasumber yang menyatakan bahwa kekayaan Mardani H Maming melonjak saat jadi bupati serta memberikan kritik dan opini dari anggota DPRD Tanah Bumbu, Fawahisah Mahabatan mengenai Tanah Bumbu harus memperkuat SDM nya.

Berdasarkan dari pengamatan awal tersebut, dapat dilihat perbedaan dalam pernyataan dari kedua portal media *Online* tersebut mengenai kasus suap izin tambang Mardani Maming. Sekalipun kedua media tersebut memiliki komitmen yang sama atas fungsi memberikan informasi seputar perkembangan kasus kepada publik. Oleh karena itu, menarik untuk mempelajari lebih lanjut perbedaan antara kedua media tersebut perihal kasus suap izin tambang Mardani Maming dengan analisis Framing.

Berita adalah informasi terbaru tentang peristiwa terkini. Wartawan dan penyiar berita menghasilkan berita melalui proses pengumpulan berita dan pelaporan. Wartawan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk tempat kejadian, merangkum, dan mendistribusikannya kepada pembaca. Berita, dalam arti luas, adalah setiap laporan tentang peristiwa atau perkembangan terkini yang menarik atau penting di dunia pada umumnya. Namun, pengertian berita menurut Nasution adalah Berita adalah tentang peristiwa terkini yang ditujukan untuk khalayak luas, memiliki kualitas keterangan saksi mata, terjadi di lingkungan terdekat pembaca, melibatkan tokoh-tokoh terkemuka di lapangan (Karunia, 2022).

Era saat ini, yang dikenal sebagai era digital, adalah era di mana semua manusia dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang membuat mereka merasa sangat dekat meskipun secara fisik berjauhan. Kita dapat dengan mudah dan cepat menemukan beberapa informasi, bahkan secara langsung. Era Internet juga

kadang-kadang disebut Era Globalisasi. Proses integrasi internasional ini disebut globalisasi, dan ini disebabkan oleh meningkatnya aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan jaringan telekomunikasi. Era digital adalah waktu di mana segala sesuatu mungkin terjadi tanpa usaha dan tanpa batasan. Semuanya bisa dilakukan di perangkat seluler, dan ada banyak acara hari ini yang bahkan tidak mengharuskan kita untuk datang. Selama mereka memiliki sumber daya online, mereka dapat dengan mudah memperoleh apa pun yang mereka butuhkan, termasuk informasi. (Auliya, 2018).

Istilah media online digunakan untuk menggambarkan semua jenis media yang mengandalkan komunikasi elektronik dan multimedia. Pengertian Media Online sebagai Media yang Disajikan Secara Online melalui *World Wide Web*, seperti Website dan Software (aplikasi). Aplikasi chatting seperti *WhatsApp* dan *Telegram* adalah contoh media online dalam arti luas. Media online, sering dikenal sebagai media jaringan, mengacu pada segala bentuk media yang hanya dapat diakses secara online, termasuk teks, gambar, gambar bergerak, dan suara. Dengan kata lain, media online dapat diartikan sebagai segala bentuk media yang dapat diakses melalui internet (Fisipol, 2022).

Jurnalis yang bekerja secara online, juga dikenal sebagai jurnalis internet atau jurnalis web, mewakili generasi baru keahlian mereka mengikuti bentuk jurnalisme yang lebih tradisional seperti pengumpulan berita, pelaporan, dan penulisan yang terlihat di media cetak tradisional (Televisi dan Radio). Praktik jurnalistik itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pengumpulan, penulisan, dan penyebaran informasi secara tepat waktu melalui media massa. Jurnalisme juga dapat digunakan dalam arti meliput suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Sebaliknya, jurnalisme online mengacu pada penyebaran berita dan informasi lainnya melalui platform digital. (Romli, 2018).

Melalui analisis framing, Menurut Eriyanto framing adalah metode melihat bagaimana media memberitakan suatu peristiwa. Menceritakan melalui sudut pandang realistik yang membuat berita. Pandangan ini mempengaruhi hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing juga merupakan analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. selanjutnya penelitian ini ingin melihat bagaimana pemberitaan kasus izin tambang

Mardani Maming pada portal berita Kompas.com dan Prokal.com. Metode framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Keunikan model ini adalah memandang framing sebagai sarana untuk menemukan bagaimana sebuah media menyajikan berita dan mengkonstruksi realitas melalui kata-kata, kalimat, musik, hubungan antar kalimat, gambar, grafik, dan alat-alat lain untuk memaknai medium tersebut sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Dengan menggunakan sejumlah perangkat analisis antara lain yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan. Penelitian pertama yang berjudul “Pembingkaihan Berita Kasus Korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Di Media Online Zonasultra.com” yang ditulis oleh Novaldi Asman, La Tarifu dan Joko pada tahun 2017 yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis framing Robert Entmant berdasarkan hasil analisis framing model Robert Entmant terhadap berita kasus korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, penulis mengambil kesimpulan bahwa media online Zonasultra.com cenderung mengangkat peristiwa kasus Nur Alam sebagai persoalan Hukum. Zonasultra.com juga melihat kasus ini tidak hanya sekedar kasus hukum semata, melainkan adanya unsur kedekatan yang kuat terkait status sosial Nur Alam sebagai tokoh politik dan menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Pembingkaihan berita yang dilakukan oleh Zonasultra.com dilakukan dengan cara pemilihan sumber berita, pemilihan kutipan dari sumber berita, dan penempatan gambar yang mendukung pembingkaihan pemberitaan. Zonasultra.com juga cukup selektif dalam pemilihan dan penonjolan fakta-fakta. Penekanan penyelesaian dapat di lihat dari sikap tegas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penelitian kedua yang berjudul “Analisis Konstruksi Realitas Media Tentang Berita Kasus Korupsi Gubernur Aceh di Harian Serambi Indonesia” yang ditulis oleh Uci Setiawan, Dr. Hamdani M. Syam, MA yang dilakukan dengan metode analisis framing Robert Entman dengan hasil bahwa Dalam penulisan berita atau pada tahap menyiapkan materi rekonstruksi, Serambi Indonesia tidak hanya mengambil narasumber dari pihak KPK saja, tetapi juga menghadirkan pendapat dari beberapa narasumber seperti Mendagri (Menteri Dalam Negeri), pengamat politik, masyarakat dan termasuk Irwandi. Pada tahap pembentukan konstruksi,



masyarakat ikut menanggapi tentang kasus Irwandi dan khalayak ikut membenarkan apa yang diberitakan. Pada tahapan konfirmasi, serambi sebagai media yang menerbitkan pemberitaan tentang kasus Irwandi Yusuf selalu memaparkan argumentasi disetiap berita yang dituliskannya.

Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembedaan mengenai kasus suap izin tambang yang melibatkan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yaitu Mardani Maming dengan menggunakan media nasional dan media lokal. Serta fokus pada penelitian ini adalah bagaimana framing media nasional dan media lokal Kalimantan dalam menyajikan pembedaan berita terkait dengan kasus suap izin tambang di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang di terima oleh Mardani Maming selaku Bupati Tanah Bumbu pada saat itu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pembedaan Pemberitaan Kasus Suap Izin Tambang Mardani Maming periode Juni – Agustus 2022 Pada Portal Berita Prokal.co dan Kompas.com?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembedaan Pemberitaan Kasus Suap Izin Tambang Mardani Maming periode Juni – Agustus 2022 Pada Portal Berita Prokal.co dan Kompas.com.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Untuk memperkaya penelitian Komunikasi khususnya pada analisis teks pada portal berita *Online* dengan menggunakan metode Framing.

### **2. Manfaat Praktis**

Menjadi referensi bagi jurnalis mengenai kecenderungan pembedaan media pada kasus suap izin tambang yang diterima Mardani Maming.

